

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil penelitian yang telah dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel makro ekonomi (Nilai tukar, RGDP, Inflasi, OPEN, M2 dan CPS ) terhadap Ekspor Non Migas di Indonesia tahun 2003-2015 dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, hasil estimasi jangka pendek memperlihatkan bahwa variabel RGDP, OPEN dan jumlah uang beredar (M2) memiliki hubungan yang positif signifikan dengan ekspor non migas. Sedangkan nilai tukar rupiah, tingkat inflasi dan kredit ke sektor swasta (CPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas di Indonesia.

Kedua, dalam jangka panjang variabel nilai tukar dan RGDP memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ekspor non migas di Indonesia. Ketika nilai tukar rupiah mengalami peningkatan (depresiasi) akan mengakibatkan jumlah ekspor non migas Indonesia mengalami peningkatan karena harga barang domestik lebih murah dimata asing. Begitu juga dengan RGDP, jika RGDP meningkat maka ekspor non migas akan meningkat.

Ketiga, dalam jangka panjang variabel tingkat inflasi (INF), keterbukaan ekonomi (OPEN), jumlah uang beredar (M2) dan CPS memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap ekspor non migas di Indonesia. Jika inflasi mengalami peningkatan, maka jumlah ekspor non migas menurun. Pada saat inflasi meningkat, harga barang dan jasa menjadi lebih mahal sehingga daya beli masyarakat akan menurun. Akibatnya permintaan terhadap barang berkurang dan

jumlah ekspor menurun. Begitu juga dengan variabel lainnya, ketika tingkat keterbukaan ekonomi (OPEN), jumlah uang beredar (M2) dan CPS meningkat akan berdampak kepada penurunan ekspor non migas Indonesia dalam jangka panjang.

## 6.2 Saran dan Penerapan Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dan produsen untuk meningkatkan jumlah ekspor non migas ke berbagai negara. Penelitian ini menemukan bahwa RGDP memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap ekspor non migas baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi langkah kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah adalah : pertama, pemerintah harus bisa memperhatikan dengan baik apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Diantaranya adalah adanya investasi atau penanaman modal, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam, teknologi, efisiensi, dan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan investasi atau penanaman modal, pembaharuan terhadap teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam, sehingga dengan begitu pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan secara signifikan.

Kedua, dalam jangka pendek jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap ekspor non migas namun berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Disini langkah dan kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah harus efektif. Di satu sisi penambahan jumlah uang beredar akan berdampak positif, sedangkan disisi lain akan berdampak negatif. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan kebijakan moneter ekspansif agar daya beli masyarakat meningkat sehingga perekonomian menjadi lebih bergairah. Setelah perekonomian mulai meningkat, maka secara perlahan pemerintah bisa mengurangi jumlah uang beredar dengan melakukan kebijakan moneter kontraktif untuk menghindari resiko inflasi dalam jangka panjang yang dapat berakibat buruk pada perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin stabilitas moneter dan perekonomian untuk membendung terjadinya inflasi yang tinggi di dalam sebuah negara.

Ketiga, keterbukaan ekonomi juga berpengaruh positif dalam jangka pendek namun berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Artinya pemerintah bisa memanfaatkan keterbukaan ekonomi dan hubungan dagang yang telah dilakukan dengan berbagai negara untuk bisa memacu dan merangsang pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka pendek. Selain itu, tingkat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi itu harus bisa diimbangi dengan terus melakukan pembaharuan dan inovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan agar produk dalam negeri tidak kalah saing dengan produk negara lain. Jika pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan untuk hal tersebut, maka permintaan produk dalam negeri secara perlahan akan berkurang sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengimpor barang dari luar. Akibatnya perkembangan ekspor menjadi turun.

Keempat, nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor non migas di Indonesia dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor non migas di Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menjaga nilai tukar pada level yang tepat

merupakan kebijakan yang perlu dilakukan agar peningkatan ekspor Indonesia dapat terus terjadi. Pemerintah dan Bank Sentral bisa saja menerapkan sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Dalam kurs tetap ini, bank sentral melakukan intervensi aktif di pasar valas dalam penetapan nilai tukar. Nilai tukar mungkin masih bergerak, namun dalam rentang (*spread/bandwidth*) yang sangat sempit. Dengan demikian, pemerintah bisa melakukan devaluasi untuk mencegah terjadinya penurunan ekspor. Disamping itu, perlu diciptakan situasi yang kondusif bagi perusahaan pengekspor untuk berproduksi di Indonesia.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan variabel makro ekonomi yang lebih kompleks dan model yang bervariasi lagi sehingga akan memberikan hasil yang nantinya bisa dijadikan rekomendasi untuk kebijakan pemerintah. Selanjutnya penelitian ini akan menambah kepustakaan dibidang ekonomi moneter dan perdagangan internasional dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan. Sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan gambaran umum yang lebih baik lagi tentang ekspor non migas dan dapat dijadikan bahan bandingan dengan negara yang lebih maju dari negara Indonesia.